

**PANCASILA DAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA:  
MANIFESTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERGAMA KOTA JAYAPURA**

**Amirullah<sup>1</sup>**

[Jayapura.amir01@gmail.com](mailto:Jayapura.amir01@gmail.com)

**Eko Siswanto<sup>2</sup>**

[Siswantoeko44@yahoo.co.id](mailto:Siswantoeko44@yahoo.co.id)

**Syaiful Muhyidin<sup>3</sup>**

[syaifulreog@yahoo.com](mailto:syaifulreog@yahoo.com)

**Athoillah Islamy<sup>4</sup>**

[athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

**Abstrak:**

*Konflik antar umat beragama yang pernah terjadi berkepanjangan di Jayapura telah padam dan menjelma menjadi kehidupan yang damai. Salah satu perangkat yang berkontribusi besar dalam perubahan progresif tersebut, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Jayapura. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam strategi pembinaan kerukunan umat bergama oleh FKUB Kota Jayapura. Penelitian kualitatif berupa studi kasus ini menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris-filosofis. Data primer diambil dari informasi lapangan melalui observasi, wawancara. Sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek pokok pembahasan. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Sementara itu, teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan manifestasi nilai-nilai pancasila dalam peran FKUB Kota jayapura dapat dipetakan menjadi tiga strategi besar. Pertama, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dalam dialog tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Kedua, nilai demokrasi permusyawaratan dalam menampung dan merekomendasikan aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai kebijakan pemerintah. Ketiga, nilai keadilan universal dalam sosialisasi kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama. Implikasi teoritik dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelbagai nilai sosial dan keberagamaan yang termuat dalam Pancasila berkontribusi besar dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama.*

**Kata kunci:** Pancasila, Forum Kerukunan Umat Beragama, Jayapura

---

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

**Abstract**

*The inter-religious conflict that has been going on for a long time in Jayapura has been extinguished and transformed into a peaceful life. One of the tools that made a major contribution to this progressive change, namely the Jayapura City Religious Harmony Forum (FKUB). This study intends to identify the values of Pancasila in the strategy of fostering religious harmony by FKUB Jayapura City. This qualitative research is a case study using a normative-empirical-philosophical analysis approach. Primary data is taken from field information through observation, interviews. Meanwhile, secondary data are taken from various scientific literatures that are relevant to the main object of discussion. The nature of this research approach is descriptive-analytic. Meanwhile, data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data verification. The results show that the manifestation of Pancasila values in the role of the Jayapura City FKUB can be mapped into three major strategies. First, the values of divinity, humanity, and unity in dialogue between religious leaders and community leaders. Second, the value of deliberative democracy in accommodating and recommending religious and community aspirations as a government policy. Third, the value of universal justice in the socialization of government policies regarding religious harmony. The theoretical implication of this research shows that various social and religious values contained in Pancasila make a major contribution to fostering inter-religious harmony.*

**Keywords:** *Pancasila, Religious Harmony Forum, Jayapura*

**A. Pendahuluan**

Salah satu faktor dominan yang sering diasumsikan sebagai pemicu konflik sosial politik di tengah masyarakat, yakni faktor kepentingan pragmatis individu maupun kelompok yang dibungkus dengan pelbagai doktrin ajaran agama.<sup>5</sup> Terlepas benar apa tidak, pada ranah realitas empiriknya, tidak sedikit ditemukan konflik sosial-politik yang terlihat berlindung di balik bendera kesakralan agama.<sup>6</sup> Pelbagai konflik umat beragama yang pernah terjadi di Jayapura Papua misalnya, eksistensi agama yang seharusnya menjadi medium integrasi kehidupan sosial justru menjadi elemen disintegrasi sosial. Bahkan faktor elemen agama tersebut semakin menguat ketika bercengkrama dengan kepentingan politik pragmatis yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sintha Wahjusaputri, "Religion Conflicts In Indonesia Problems And Solutions," *Sociology Study*, Vol. 5, No. 12 (2015): 931.

<sup>6</sup> Mohamad Takdir, M. Musthafa, Rozinah As, "The Dynamics Of Religious Conflict In Indonesia: Contestation And Resolution Of Religious Conflicts In The New Order Age," *Al-Adyan :Journal Of Religius Studies*, Vol 2, No 2 (2021) :103.

<sup>7</sup> Idrus Al Hamid, Irwan Abdullah, Zainal Abidin Bagir, "Ketegangan Politik Lokal: Konstruksi Konflik Agama Tanah Papua," *Journal Of Government And Politic* Vol.4 No.2 (2013): 409.

Namun demikian, penting diketahui ragam konflik antar umat beragama yang pernah berkepanjangan di Jayapura telah surut dan meredam.<sup>8</sup> Pernyataan demikian dikuatkan oleh wajah kehidupan masyarakat Jayapura saat ini yang harmonis dan memancarkan pesona perdamaian. Kondisi demikian tidak terlepas dari kesadaran kolektif masyarakat Jayapura untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan beragama. Kesadaran tersebut semakin menguat ketika kota Jayapura dilengkapi berbagai perangkat perekat umat. Salah satu perangkat yang berkontribusi besar, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Jayapura. Terbentuknya FKUB Kota Jayapura berdasarkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Papua No. 135 Tahun 2007 tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Se-Papua menjadi elemen kuat yang mendukung pemeliharaan kerukunan umat beragama.<sup>9</sup>

Terlepas peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Jayapura, penting kita sadari bahwa sebagai masyarakat beragama, masyarakat Jayapura sejatinya memiliki memiliki norma-norma sosial kemasyarakatan yang universal.<sup>10</sup> Norma universal tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama yang mendukung terciptanya kerukunan di lingkungan mereka.<sup>11</sup> Hal demikian setidaknya juga dapat ditemukan dalam dua agama besar yang dianut masyarakat Jayapura, yakni Islam dan Kristen.<sup>12</sup> Pada konteks Islam misalnya, terdapat misi ajaran universal berupa menebarkan kasih sayang kepada seluruh kehidupan alam (*rahmatan lil alamin*).<sup>13</sup> Manifestasi atas universalisme ajaran Islam tersebut melintasi ruang, waktu, bahasa maupun kelompok manusia apapun.<sup>14</sup> Seperti halnya, nilai musyawarah, keadilan dan

---

<sup>8</sup> Amirullah, Kasjim Salenda, Nurman Said, Abdul Wahid Haddade, "Establishing Harmony Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari' Ah Perspective," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.8, No.1 (2020):21

<sup>9</sup> Muh. Anang Firdaus, "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura," *Jurnal Diskursus Islam* Volume 2 Nomor 1(2014): 4.

<sup>10</sup> McKay R, Whitehouse H, Religion and Morality," *Psychol Bull.* 141(2) (2015):447,

<sup>11</sup> Ni Made Ruastiti, *Merajut Kerukunan Di Jayapura* (Mimika Baru, Penerbit Aseni, 2020), 4-5

<sup>12</sup> Hasse Jubba1, Irwan Abdullah , Mustaqim Pabbajah , Suparto Iribaram4 , Zaenuddin Hudi Prasajo5 , Zuli Qodir. "The Display Of Religious Symbols In Public Space: The Contestation Of Muslim And Christian Identities In Jayapura, Papua," *Humanities And Social Sciences Reviews* Vol.8, No.1 (2020):642.

<sup>13</sup> Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.

<sup>14</sup> Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy, "Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama," *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah* Vol.3, No.2 (2021): 287.

kemashlahatan sosial.<sup>15</sup> Tidak hanya itu, juga terdapat ajaran toleransi (*tasamuh*) yang berkolerasi erat dengan ajaran Islam berupa persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah islamiyah*), sesama tanah air (*ukhuwah watoniah*), dan sesama manusia (*ukhuwah insaniah*).<sup>16</sup> Berbagai nilai universal ajaran Islam tersebut dapat menjadi nilai sosial profetik dalam segala aspek kehidupan sosial keberagamaan, bahkan sosial-politik di Indonesia.<sup>17</sup> Begitu juga dalam ajaran Kristen. Ajaran Yesus terkait toleransi berupa sikap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ajaran universal agama Kristen demikian dapat ditemukan dalam Matius 22:39.<sup>18</sup>

Tidak sekedar pertimbangan etik normatif-teologis di atas, masyarakat Jayapura sebagai bagian wilayah negara Indonesia dengan memiliki ragam latar belakang kehidupan yang memiliki ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara telah memuat berbagai nilai universal tersebut dapat membentuk karakter kehidupan keberagamaan dan sosial yang moderat.<sup>20</sup> Terlebih sebagai nilai dan landasan paradigmatis dalam upaya meralisasikan integrasi bangsa.<sup>21</sup> Tidak terkecuali dalam mewujudkan kerukunan kehidupan umat beragama di tengah kemajemukan hidup di Indonesia, seperti halnya di Jayapura.

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam strategi pembinaan kerukunan umat beragama yang diimplementasikan oleh FKUB Kota Jayapura. Penelitian ini penting dilakukan. Mengingat masih saja ditemukan konflik sosial antar umat beragama di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik teoritik maupun praktik terkait strategi pembinaan kerukunan umat beragama melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. Meski demikian penulis menyadari bahwa terdapat berbagai penelitian

---

<sup>15</sup> Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

<sup>16</sup> Ali Ahmad Yenuri et al., "Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia: (Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq)," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 141.

<sup>17</sup> Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia," *Asy-Syar'iyah dan Perbankan Islam*, Vol.5, No.2 (2020): 155.

<sup>18</sup> Rikardo Dayanto Butar-Butar, Ester Lina Situmorang, Jabes Pasaribu, Manahan Uji Simanjuntak, "Pengajaran Tuhan Yesus Mengenai Toleransi Dan Implementasinya Ditengah Masyarakat Majemuk," *Real Didache : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol 4, No 1 (2019):93.

<sup>19</sup> Mirwan Fikri Muhkam, Sukri Badaruddin, "Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology," *Al-Bayyinah* Volume 5 No. 2(2021):129-130.

<sup>20</sup> Donny Khoiril Azis et al., "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2021): 231.

<sup>21</sup> Anang Dony Irawan, "Nationalism In A State Based On Pancasila," *Pelita*, Vo.5, No.2 (2020): 133.

sebelumnya yang telah mengeksplorasi maupun mengidentifikasi gejala konflik umat beragama di Jayapura dengan pelbagai fokus dan perspektif masing-masing. Namun berdasarkan penelusuran penulis, penelitian terkait strategi atau peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jayapura dalam meredam konflik umat beragama masih relatif sedikit. Meski demikian, penulis berhasil menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan objek pokok penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Penelitian Muh. Anang Firdaus (2014) menuturkan bahwa kondisi dan karakter masyarakat Kota Jayapura yang harmonis, toleran, terbuka dan dinamis telah mendukung sekaligus membantu peran FKUB Kota Jayapura dalam merealisasikan kerukunan umat beragama di Jayapura. Tidak hanya itu, adanya sikap kesadaran masyarakat Jayapura yang menjunjung tinggi toleransi terhadap eksistensi agama orang atau kelompok lain yang ada menjadi modal sosial yang strategis dalam memecahkan persoalan sosial bersama yang ada.<sup>22</sup> Kemudian Amirullah, Kasjim Salenda, Nurman Said, dan Abdul Wahid Haddade (2020) dalam penelitiannya menyatakan keberadaan FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama dalam perspektif Hukum Islam menunjukkan upaya dalam merealisasikan beerbagai orientasi pensyariaan hukum Islam, seperti halnya menjaga kemaslahatan eksistensi agama, jiwa, dan akal dalam kehidupan manusia yang majemuk.<sup>23</sup> Berikutnya, penelitian oleh Sabara dan Elce Yohana Kodina (2020). Meski tidak menyoroti secara spesifik peran FKUB Jayapura, akan tetapi dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa berbagai prinsip nilai yang menjadi landasan paradigmatis oleh pelbagai kelompok Islam dalam membina kerukunan hidup umat beragama di Jayapura, antara lain prinsip moderasi dan inklusivisme Islam yang paralel dengan misi Islam sebagai ajaran yang menebar kasih sayang kepada kehidupan seluruh alam (*rahmatan lil alamin*).<sup>24</sup>

Berpijak dari berbagai penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang fokus dalam mengidentifikasi manifestasi nilai-nilai Pancasila pada peran FKUB Kota Jayapura

---

<sup>22</sup> Muh. Anang Firdaus, "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Jayapura," *Jurnal Diskursus Islam* Volume 2 Nomor 1(2014 )32

<sup>23</sup> Amirullah, Kasjim Salenda, Nurman Said, Abdul Wahid Haddade, "Estabilishing Harmony Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari' Ah Perspective," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.8, No.1 (2020):21

<sup>24</sup> Sabara, Elce Yohana Kodina, "Religious Harmony In The Thought And Practice Of Islamic Religious Groups In Jayapura," *Harmoni :Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 19 no.2 (2020): 297.

dalam mewujudkan umat beragama. Fokus inilah yang kemudian dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* dari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif berupa studi kasus ini menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris-filosofis dalam mengungkap nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam berbagai strategi penangangan konflik umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Jayapura. Data primer diambil dari informasi lapangan melalui observasi, wawancara. Sementara data sekunder diambil dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek pokok pembahasan, antara lain buku, jurnal, tesis maupun disertasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok penelitian. Sesudah data terkumpul, tahap berikutnya, yakni teknik analisa data. Pada teknik analisis data ini ada tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data (penarikan kesimpulan).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pancasila : Landasan Paradigmatik dalam Mewujudkan Peradaban Kehidupan Sosial di Tengah Kemajemukan Indonesia**

Keberadaan Pancasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia telah menjadi ideologi, pedoman dan juga pandangan hidup yang penting dimanifestasikan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis. Hal demikian disebabkan Pancasila telah menjadi identitas sekaligus kepribadian masyarakat Indonesia.<sup>25</sup> Pada sub bab pembahasan ini, akan diuraikan nilai-nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

**Sila Pertama**, berbunyi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang relius, beragama, dan bangsa yang berketuhanan. Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara yang mmenjunjung nilai-nilai agama bukan negara sekular. Pernyataan demikian secara praksis dapat dilihat dalam realitas empiriknya bahwa terdapat pluralitas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

---

<sup>25</sup>Purwito Adi, "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 39.

Konsekuensi dari keragaman tersebut juga berimplikasi pada pentingnya mewujudkan nilai etis toleransi antar umat beragama di Indonesia.<sup>26</sup>

**Sila Kedua**, berbunyi *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Sila tersebut mengandung pentingnya kesadaran masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsekuensinya wajib dapat menghormati hak dan martabat antar sesama manusia, saling menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab.<sup>27</sup>

**Sila Ketiga**, berbunyi *Persatuan Indonesia*. Sila ini memuat pesan pentingnya masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. Sebagai komitmen bersama, nilai, semangat dan sikap persatuan harus dapat senantiasa diwujudkan demi terciptanya kemaslahatan kehidupan sosial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan konstitusi tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan.

**Sila Keempat**, berbunyi *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan*. Pesan nilai dalam sila keempat mengamanatkan masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan sistem kehidupan beragama yang demokratis, yakni sistem pemerintahan yang menjadikan kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dengan kata lain, masyarakat diberikan ruang untuk bermusyawarah serta bermufakat dalam mencari solusi persoalan bersama.

**Sila Kelima**, berbunyi *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Sila kelima ini mengandung makna bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan perlakuan secara adil apapun latar belakangnya. Perwujudan dari sila kelima tersebut dapat berwujud penegakan hukum melalui asas keadilan tanpa keuangan serta jabatan, terhindar dari tekanan fisik, mental, maupun tekanan dari pihak asing dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Dalam hal ini, berbagai nilai luhur dalam Pancasila harus dijadikan landasan utama pada pembentukan peraturan, hukum maupun perundang-undangan di Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Wendy Anugrah Octavian, "Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa," *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 5, no. 2 (2018): 125.

<sup>27</sup> Damanhuri et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa," *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 (2016): 189.

<sup>28</sup> Octavian, "Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa," 126–27.

<sup>29</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 2.

Penting diketahui bahwa kelima sila dalam Pancasila di atas merupakan kesatuan organis yang utuh. Pesan nilai yang termuat dalam masing-masing sila sejatinya tidak dapat didikotomikan. Dengan kata lain, semua pesan nilai yang termuat dalam Pancasila memiliki relasi integratif dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.<sup>30</sup>

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, maka pelbagai nilai dan cita luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila menjadi representasi modal nilai sosial yang kuat. Tidak terkecuali menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi di tengah pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia. Pelbagai prinsip berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial sudah semestinya mesti menjadi visi bersama bagi tiap sendi kehidupan berbangsa. Melalui pelbagai nilai tersebut dengan mudah akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi.<sup>31</sup> Atas dasar inilah kelima sila dalam Pancasila seyogyanya dapat menjadi landasan paradigmatis dalam segala pembentukan norma sosial, budaya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali dalam strategi pembinaan kerukunan umat beragama oleh FKUB Kota Jayapura yang menjadi objek inti pembahasan pada penelitian ini.

### **Struktur Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) di Kota Jayapura**

Adapun struktur kelembagaan FKUB di kota Jayapura mengacu pada ketentuan KMA No 1 tahun 2006 yang meliputi ketentuan, sebagai berikut. Pertama, keanggotaan FKUB meliputi para tokoh agama setempat. Jumlah anggota FKUB Provinsi maksimal 21 orang. Sementara itu, jumlah anggota FKUB Kabupaten atau Kota maksimal 17 orang. Kedua, komposisi keanggotaan FKUB Prov & Kab/Kota ditetapkan atas perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan bentuk representasi minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yg ada di Prov dan Kab/Kota. Kemudian setiap FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris. Semuanya dipilih melalui musyawarah anggota.

---

30 Adi, "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI," 40.

31 Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, (2016):185.

Sementara itu, FKUB Kota Jayapura berkantor di Abepura Kota Jayapura sejak tahun 2017 dengan berbagai kegiatannya bertekad untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Kota Jayapura. Berikut susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2017-2022 Kota Jayapura, sebagai berikut.<sup>32</sup>

Ketua : Pdt. Willem F. Itaar, S.Th., MH.

Wakil Ketua I : H. Kahar Yelipele, M.Pd.I.

Wakil Ketua II: R.D. Andreas Trismadi, PR.

Sekretaris : Dr. Eko Siswanto, M.HI.

Wakil Sekretaris : Yohanes Nahak, S.Ag.

Anggota: Pdt. Lucky Matui, S.Th., MM.

Pdt. Betuil Karubaba, S.Th., MM.

Pdt. Yesaya Dimara, S.Th.

Pdt. Jantje Suruan

Hendrikus Harun, S.Ag.

Ida Bagus Suta Kertya, M.Si.

Pdt. Johanis R. Leleuly, SM.Th., SH.

Muh. Said, HK., SH.

Pdt. Marten Maury, S.Th.

Sukaryanto, S.IP.

Pdt. Jasmani

Pdt. Moses Pulalo, M.Th.

### **Dimensi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran FKUB Kota Jayapura dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**

Kendatipun banyak asumsi di tengah masyarakat Indonesia yang menolak adanya keterkaitan identitas agama dan etnis sebagai cikal bakal lahirnya pelbagai bentuk konflik umat beragama yang terjadi pelbagai daerah latar belakang munculnya konflik di Indonesia. Namun pada realitas empiriknya, semangat keberagamaan dan semangat etnisisme menjadi elemen pendukung yang berperan besar dalam memicu terjadinya

---

<sup>32</sup> Surat Keputusan (SK) Walikota Jayapura Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB Kota Jayapura Periode 2017-2022.

pelbagai konflik tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa relasi antar agama dan etnik di Indonesia berpotensi besar dalam melahirkan ragam konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut meniscayakan peran aktif seluruh elemen masyarakat, terlebih peran pemerintah melalui pelbagai kebijakannya, baik pemerintah lokal maupun pusat.<sup>33</sup> Pentingnya peran tersebut sebagaimana yang diejawantahkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura yang menjadi objek pokok dalam pembahasan penelitian ini.

Secara yuridis-normatif, eksistensi FKUB di Kota Jayapura mendapat dukungan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Kemudian Surat Keputusan (SK) Walikota Jayapura Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB Kota Jayapura Periode 2017-2022. Pelbagai landasan normatif yuridis sebagaimana yang disampaikan Willem F. Ittar selaku Ketua FKUB Kota Jayapura. Ia menuturkan bahwa FKUB di Kota Jayapura, adalah forum kerukunan umat beragama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, menjaga, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Keberadaannya sangat bermanfaat dalam menjawab persoalan umat dan dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan analisis penulis anifestasi nilai-nilai pancasila dalam peran FKUB Kota jayapura dapat dipetakan menjadi tiga strategi besar. Pertama, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dalam dialog tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Kedua, nilai demokrasi permusyawaratan dalam menampung dan merekomendasikan aspirasi keagamaan dan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah. Ketiga, nilai keadilan universal dalam sosialisasi kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama masyarakat. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

---

<sup>33</sup> Muh. As'ad, "Kehidupan Keagamaan dan Budaya Masyarakat di Kota Jayapura Provinsi Papua," *Jurnal "Al-Qalam"* No. xx Tahun xiii Edisi Juli - Desember (2007):85

<sup>34</sup>Willem F. Ittar (52 tahun), Ketua FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Maret 2019.

### **Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan dalam Dialog Tokoh Agama dengan Tokoh Masyarakat**

Tujuan diselenggarakan dialog bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat oleh FKUB Kota Jayapura, yakni untuk memahami permasalahan dalam pengembangan kegiatan kerukunan umat beraga, di Kota Jayapura.<sup>35</sup> Kegiatan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut dilaksanakan secara kelompok kemudian dikonsultasikan kepada seluruh *stakeholder* tokoh-tokoh kemasyarakatan, maupun dari pihak luar FKUB di Kota Jayapura seperti tokoh pemuda dan para akademisi. Salah satu tahap pelaksanaan program dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung sudah sering dilakukan adalah evaluasi yaitu tindak lanjut sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan dialog, mengetahui kendala waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk merefleksi tindakan yang akan datang.

Pada ranah praksisnya, dalam dialog tersebut, para tokoh agama dan tokoh masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan apa persoalan yang dialami mereka terkait hal-hal yang berkaitan erat dengan upaya perwujudan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Tujuan dari proses dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan isu agama sangat menonjol dibandingkan isu politik dan ekonomi. Hal tersebut dimaksudkan agar persoalan yang dapat dipahami dan dianalisis bersama dengan baik untuk menemukan solusinya.<sup>36</sup> Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan umum dari dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait berbagai permasalahan untuk mencari solusi dengan baik.

Secara filosofis, keberadaan langkah strategis yang dilakukan oleh FKUB Kota Jayapura dalam bentuk dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat mencerminkan beberapa nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan dan dapat dianalisis secara bijak. Setidaknya terdapat nilai ketuhanan (sila pertama), kemanusiaan (sila kedua), dan persatuan (sila ketiga). Penjelasan sebagai berikut.

Pertama, sila ketuhanan. Manifestasi nilai sila ketuhanan dalam bentuk memberikan ruang kepada para tokoh agama untuk menyampaikan pelbagai persoalan terkait perwujudan kerukunan umat beragama dan juga diberi kesempatan untuk bersama-

---

<sup>35</sup>Eko Siwanto (43 tahun), Sekretaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.

<sup>36</sup>Said (52 tahun), anggota FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 24 April 2019.

sama menemukan jalan keluar terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi bersama. Fenomena demikian paralel dengan falsafah pancasila yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berketuhanan atau negara beragama. Namun bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. Konsekuensinya, yakni semua agama memiliki peran bersama dalam merealisasikan visi berketuhanan yang berkebangsaan negara Indonesia.<sup>37</sup> Oleh sebab itu ruang dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat dikatakan sebagai manifestasi kesadaran FKUB untuk menjadikan pemikiran keagamaan sebagai elemen penting dalam menyelesaikan persoalan bersama untuk mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

Kedua, sila kemanusiaan dan persatuan. Aktualisasi kedua nilai sila tersebut terlihat dalam meleburnya seluruh elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat dari lintas agama di ruang dialog yang diadakan FKUB kota Jayapura. Hal demikian menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan persatuan diposisikan sebagai nilai fundamental yang dapat mempertemukan seluruh elemen tokoh agama dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan bersama dalam mewujudkan kerukunan hidup umat bergama. Penting disadari kembali bahwa misi untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan dan persatuan dalam bingkai kehidupan antar umat beragama yang majemuk merupakan hal yang niscaya dan sangat dibutuhkan, terlebih menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi dalam visi kebangsaan Indonesia terdapat misi perjuangan bersama. Konsekuensinya semua elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang status agama, golongan, suku, ras dan pelbagai unsur primordial lain, mereka semua memiliki kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya.<sup>38</sup> Atas dasar inilah maka terselerenggaranya ruang dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh FKUB Kota Jayapura dapat dikatakan sebagai diseminasi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup umat beragama.

### **Nilai Demokrasi Permusyawaratan dalam Menampung dan Merekomendasikan Aspirasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Sebagai Kebijakan Pemerintah**

---

37 Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, (2016):181.

38 Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, (2016):181.

Setidaknya terdapat tiga metode dalam memahami bentuk aspirasi rakyat. Pertama, untuk memahami ruang lingkup partisipasi yang akan menentukan siapa saja yang berhak menyampaikan aspirasi sebuah kebijakan. Kedua, untuk memahami jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Pada konteks ini, model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Ketiga, untuk memahami relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan yang berkembang di masyarakat maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi semakin berkualitas.<sup>39</sup>

Tidak sekedar berhenti pada level dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat. Berikutnya peran FKUB di Kota Jayapura, yakni menampung aspirasi keagamaan dan aspirasi masyarakat.<sup>40</sup> Aspirasi yang telah ditampung tersebut kemudian disalurkan oleh FKUB dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijaksanaan pemerintah setempat.<sup>41</sup>

Langkah strategis FKUB dalam menampung sekaligus menyalurkan aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam mendukung perwujudan kehidupan umat beragama merupakan bentuk kongkrit manifestasi nilai-nilai demokrasi permusyawaratan. Kesimpulan demikian tidaklah berlebihan. Mengingat dalam sistem demokrasi permusyawaratan yang dianut di Indonesia, meniscayakan bahwa melalui partisipasi politik, semua elemen masyarakat dengan latarbelakang status agama apapun memiliki hak yang sama, baik terkait hak sipil-politik maupun hak sosial agama dan budaya. Dengan kata lain, tidak ada istilah keistimewaan hak bagi umat bergama mayoritas dan diskriminasi hak bagi umat beragama minoritas. Keduanya mendapat perlakuan sama dalam sitem demokrasi.<sup>42</sup> Terlebih di Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem politik demokrasi Pancasila, maka dalam perumusan bentuk kebijakan pemerintah, baik terkait norma politik, ekonomi, sosial budaya, kebijakan

---

39 Muhammad Salman. "Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang". Tesis (Universitas Sumatera Utara: Medan, 2008), h. 34.

40 Komar (46 tahun), anggota KKSS Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Mei 2019.

41 Iida Bagus Sutra Kartya (47 tahun), Anggota FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.

42 Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, (2016):181.

publik, maupun perundang-undangan harus menjunjung tinggi pelbagai nilai Pancasila.<sup>43</sup> Oleh karenanya, strategi menampung sekaligus menyalurkan aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama merupakan manifestasi demokrasi permusyawatan untuk mewujudkan harmoni dalam bingkai pluraitas kehidupan umat beragama di Indonesia

### **Nilai Keadilan Universal dalam Sosialisasi kebijakan Pemerintah Tentang Kerukunan Umat Beragama Masyarakat**

Peran FKUB di Kota Jayapura berikutnya, yakni melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan. Sosialisasi tersebut penting dilakukan mengingat terlebih di berbagai aktifitas keagamaan maupun di tempat ibadah. Hal demikian bertujuan agar tersebar informasi-informasi baru terkait kebijakan pemerintah dalam membina kerukunan hidupan umat beragama.<sup>44</sup>

Adapun sosialisasi FKUB secara simbol yang dilakukan oleh FKUB berupa publikasi spanduk-spanduk, stiker, dengan bahasa seruan (himbauan) menciptakan kerukunan, kedamaian dan menjaga keamanan dalam menjalankan ibadah. Pelbagai simbol seruan atau ajakan dengan tema menciptakan Jayapura damai tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan simbol pesan akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Ketika seseorang sering melihat yang baik akan mengurangi sisi buruk. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Jayapura menggunakan bahasa-bahasa simbol, sebagai lambang kesatuan simbol.<sup>45</sup>

Strategi sosialisasi peraturan atau perundangan tentang pembinaan kerukunan umat beragama di atas menunjukkan dimensi nilai keadilan uniiiversal dalam mewujudkan kehidupan harmonis antar umat bergama. Pernyataan demikian didasarkan pada bentuk penyebarluasan pentingnya semangat perdamaian dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama. Penting diisadari bahwa dengan terwujudnya perdamaian hidup antar umat beragama, maka akan mudah terwujudnya bentuk pelbagai kebijakan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan universal, tidak memandang perbedaan latar belakang, tidak terkecuali perbedaan agama. Terlebih keadilan sosial

---

43 Eko Siswanto, Athoillah Islamy, “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT,” *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol.18, No.1 (2022):25.

44Moh. Said (52 tahun), Wakil Ketua 1 FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 23 April 2019

45Eko Siswanto (43 tahun), Sekretaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.

dalam nilai Pancasila telah menjadi muara kehidupan berbangsa dalam kemajemukan hidup di Indonesia. Konsekuensinya, upaya untuk merealisasikan keadilan sosial ini menjadi tugas semua elemen bangsa. Pada konteks inilah, peran agama sangat penting dan strategis dalam menebarkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kemajemukan hidup beragama.<sup>46</sup> Oleh sebab itulah, strategi sosialisasi oleh FKUB Kota Jayapura terkait pelbagai peraturan dan perundangan tentang pembinaan kerukunan umat beragama dapat dikatakan wujud sinergitas antara agama dan negara (pemerintah) dalam menebarkan nilai-nilai keadilan universal dalam konteks kehidupan umat beragama yang majemuk.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian ini pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) kota jayapura dapat dipetakan menjadi tiga strategi besar. **Pertama**, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dalam dialog tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Manifestasi nilai sila ketuhanan dalam bentuk memberikan ruang kepada para tokoh agama untuk menyampaikan pelbagai persoalan terkait perwujudan kerukunan umat beragama dan juga diberi kesempatan untuk bersama-sama menemukan jalan keluar terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi bersama. Sementara itu, aktualisasi nilai kemanusiaan dan persatuan dalam bentuk nilai kemanusiaan dan persatuan diposisikan sebagai nilai fundamental yang dapat mempertemukan seluruh elemen tokoh agama dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan bersama dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. **Kedua**, nilai demokrasi permusyawaratan dalam menampung dan merekomendasikan aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari strategi FKUB Kota Jayapura dalam menampung sekaligus menyalurkan aspirasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam mendukung perwujudan kehidupan umat beragama. **Ketiga**, nilai keadilan universal dalam sosialisasi kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama masyarakat. Nilai tersebut dapat dilihat dalam sinergitas antara agama dan negara (pemerintah) dalam menebarkan nilai-nilai keadilan universal dalam konteks kehidupan umat beragama yang majemuk.

---

46 Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Volume 4 Nomor 2, (2016):182.

Implikasi teoritik dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan keberagamaan yang termuat dalam Pancasila berkontribusi besar dalam membina kerukunan kehidupan antar umat beragama. Keterbatasan penelitian yang dapat menjadi lacuna sebagai objek penelitian berikutnya, yakni bagaimana strategi FKUB Kota Jayapura dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pelbagai aktifitas lembaga pendidikan yang ada. Mengingat pendidikan menjadi elemen fundamental sebagai basis pembentukan karakter masyarakat dalam mewujudkan tatanana dan peradaban kehidupan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Purwito. (2016). "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 : 39.
- Al Hamid, Idrus, Irwan Abdullah, Zainal Abidin Bagir. (2013). "Ketegangan Politik Lokal: Konstruksi Konflik Agama Tanah Papua," *Journal Of Government And Politic* Vol.4 No.2 : 409.
- Amirullah, Kasjim Salenda, Nurman Said, Abdul Wahid Haddade. (2020). "Estabilishing Harmony Between Religions By The Religious Harmony Forum In Papua The Land Of Peace Maqasid Syari'Ah Perspective," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.8, No.1 :21
- As'ad, Muh. (2007). "Kehidupan Keagamaan dan Budaya Masyarakat di Kota Jayapura Provinsi Papua," *Jurnal "Al-Qalam"* No. xx Tahun xiii Edisi Juli - Desember (2007):85
- Aziz, Donny Khoirul et al. (2021). "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 : 231.
- Butar-Butar, Rikardo Dayanto, Ester Lina Situmorang, Jabes Pasaribu, Manahan Uji Simanjuntak. (2019). "Pengajaran Tuhan Yesus Mengenai Toleransi Dan Implementasinya Ditengah Masyarakat Majemuk," *Real Didache : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol 4, No 1 :93.
- Damanhuri et al (2018). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa," *Untirta Civic Education Journal* 1, no. 2 : 189.
- Eko Siwanto (43 tahun), Sekertaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 : 2.
- Firdaus, Muh. Anang. (2014). "Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura," *Jurnal Diskursus Islam* Volume 2 Nomor 1: 4.
- Irawan, Anang Dony. (2020). "Nationalism In A State Based On Pancasila," *Pelita*, Vo.5, No.2 : 133.

- Islamy, Athoillah. (2020). Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia,” *Asy-Syar’iyyah dan Perbankan Islam*, Vol.5, No.2 : 155.
- Islamy, Athoillah. (2021). “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 : 61.
- Islamy, Athoillah. (2021). “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid” (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.
- Ittar, Willem F (52 tahun), Ketua FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Maret 2019.
- Jubba, Hasse, Irwan Abdullah , Mustaqim Pabbajah , Suparto Iribaram, Zaenuddin Hudi Prasojo, Zuli Qodir.(2020). “The Display Of Religious Symbols In Public Space: The Contestation Of Muslim And Christian Identities In Jayapura, Papua,” *Humanities And Social Sciences Reviews* Vol.8, No.1 :642.
- Kartya, Ida Bagus Sutra (47 tahun), Anggota FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
- Komar (46 tahun), anggota KKSS Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 Mei 2019.
- Muhkam, Mirwan Fikri, Sukri Badaruddin. (2021). “Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology,” *Al-Bayyinah* Volume 5 No. 2:129-130.
- Octavian, Wendy Anugrah. (2018). “Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa,” *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 5, no. 2 : 125.
- R, McKay, Whitehouse H. (2015). “Religion and Morality,” *Psychol Bull.* 141(2) :447,
- Ruastiti, Ni Made. (2020). *Merajut Kerukunan Di Jayapura*, Mimika Baru, Penerbit Aseni, 4-5
- Sabara, Elce Yohana Kodina. (2020). “Religious Harmony In The Thought And Practice Of Islamic Religious Groups In Jayapura,” *Harmoni :Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 19 no.2: 297.
- Said (52 tahun), anggota FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 24 April 2019.
- Said, Moh. (52 tahun), Wakil Ketua 1 FKUB Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 23 April 2019

- Salman, Muhammad. (2008). "Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang". Tesis, Universitas Sumatera Utara: Medan, 34.
- Siswanto, Eko, Athoillah Islamy. (2022). "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT," *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol.18, No.1:25.
- Siswanto, Eko. (43 tahun), Sekretaris FKUB di Kota Jayapura, Wawancara, Jayapura, 21 April 2019.
- Surat Keputusan (SK) Walikota Jayapura Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB Kota Jayapura Periode 2017-2022.
- Takdir, Mohamad, M. Musthafa, Rozinah As. (2021). "The Dynamics Of Religious Conflict In Indonesia: Contestation And Resolution Of Religious Conflicts In The New Order Age," *Al-Adyan :Journal Of Religius Studies*, Vol 2, No 2 :103.
- Wahjusaputri, Sintha. (2015). "Religion Conflicts In Indonesia Problems And Solutions," *Sociology Study*, Vol. 5, No. 12 : 931.
- Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy. (2021). "Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama," *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah* Vol.3, No.2: 287.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy. (2021). "Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq)," *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 : 141.